



Pengendalian Likuiditas Perusahaan Dengan Pengaturan Pickup Service Perbankan Pada KCP Di PT Pos Indonesia Untuk Mencegah Terjadinya Fraud

Sandy Muhammad Kautzar¹, Syamsul Amry², Vip Paramarta³

^{1,2,3}Universitas Sangga Buana

Korespondensi Email: amry.syamsul@gmail.com

Abstract. Every business has debts that need to be paid in full and on schedule. But not every business is equally able to cover short-term obligations. If a corporation can effectively manage its liquidity and has good liquidity, it might be considered to have good capabilities. By employing liquidity ratio analysis to determine a company's level of capacity to pay its debts, Furthermore, a business must manage liquidity by examining how to best utilize liquidity in accordance with its responsibility requirements. Additionally, businesses must constantly estimate their cash availability and needs. Analyzing ratios is another way to accomplish it. Liquidity plays a crucial part in demonstrating the performance of the business. Pos Indonesia, a firm, is one that needs to

Keywords: Company Liquidity Control, Banking Pickup Service Arrangements, PT Pos Indonesia

Abstrak. Setiap perusahaan memiliki liabilitas perusahaan yang harus dibayarkan tepat waktu. Tetapi, tidak semua perusahaan memiliki kemampuan yang sama untuk membayar liabilitas jangka pendek. Perusahaan dapat dikatakan memiliki kemampuan yang baik jika, suatu entitas mempunyai likuiditas yang baik dan dapat mengendalikan dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana suatu perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk membayar liabilitas yaitu dengan menganalisis menggunakan rasio likuiditas. Tidak hanya itu, suatu perusahaan harus mengendalikan likuiditas dengan menganalisis bagaimana cara agar likuiditas dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan liabilitas yang dimiliki suatu perusahaan. Dan perusahaan juga harus memperkirakan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus menerus. Itu juga dapat dilakukan dengan menganalisis menggunakan rasio. Peran likuiditas sangat penting untuk menunjukkan suatu kinerja perusahaan. PT. Pos Indonesia merupakan perusahaan yang harus memiliki tingkat likuiditas yang baik agar dapat melakukan pembayaran terhadap liabilitas jangka pendek yang berakhir pada tahun bersangkutan. Dengan banyaknya kantor pos cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, PT. Pos Indonesia harus dapat melakukan pengendalian likuiditas yang baik untuk seluruh kantor cabang

Kata Kunci: Pengendalian Likuiditas Perusahaan, Pengaturan Pickup Service Perbankan, PT Pos Indonesia

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan memiliki liabilitas perusahaan yang harus dibayarkan tepat waktu. Tetapi, tidak semua perusahaan memiliki kemampuan yang sama untuk membayar liabilitas jangka pendek. Perusahaan dapat dikatakan memiliki kemampuan yang baik jika, suatu entitas mempunyai likuiditas yang baik dan dapat mengendalikan dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana suatu perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk membayar liabilitas yaitu dengan menganalisis menggunakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas terbagi lima antara lain, rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, rasio perputaran kas, dan rasio modal kerja. Adapun pengertian likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya yang harus segera dipenuhi dengan alat tunai maupun

pembayaran non tunai, saat jatuh tempo atau pada saat ditagih agar likuiditasnya tetap bisa bertahan.

Tidak hanya itu, suatu perusahaan harus mengendalikan likuiditas dengan menganalisis bagaimana cara agar likuiditas dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan liabilitas yang dimiliki suatu perusahaan. Dan perusahaan juga harus memperkirakan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus menerus. Itu juga dapat dilakukan dengan menganalisis menggunakan rasio. Jika sebuah perusahaan mempunyai nilai likuiditas yang tinggi maka kinerja dari perusahaan tersebut akan semakin baik juga. Karena jika nilai likuiditasnya tinggi maka akan mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain. Dengan menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dengan mengendalikan likuiditas akan dapat menarik perhatian para investor untuk berinvestasi di perusahaan. Peran likuiditas sangat penting untuk menunjukkan suatu kinerja perusahaan.

PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan perusahaan yang harus memiliki tingkat likuiditas yang baik agar dapat melakukan pembayaran terhadap liabilitas jangka pendek yang berakhir pada tahun bersangkutan. Dengan banyaknya kantor pos cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, PT. Pos Indonesia (Persero) harus dapat melakukan pengendalian likuiditas yang baik untuk seluruh kantor pos cabang. Karena jika ada terdapat masalah di salah satu kantor pos cabang itu juga akan berdampak bagi Pos Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana pengendalian likuiditas yang baik untuk Pos Indonesia penulis tertarik mengangkat judul, yaitu “Pengendalian Likuiditas Perusahaan dengan pengaturan Pickup Service Perbankan Pada KCP di PT Pos Indonesia Untuk Mencegah Terjadinya Fraud”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah jenis penelitian kualitatif deskriptif yakni penulis melakukan observasi secara langsung di PT. Pos Indonesia (Persero) dan melakukan wawancara kepada karyawan tentang penjemputan kas dan manajemen likuiditas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Observasi : Metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam.

Wawancara : Percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan

pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Wawancara yang penulis lakukan untuk pembuatan Karya Tulis ini adalah wawancara dengan staff di bagian treasury atau likuiditas PT. Pos Indonesia (Persero).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan seluruh kas dari setiap kantor pos cabang pembantu sering kali mengalami kendala. Kendala yang membuat sangat sulit untuk bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh dan terpencil. Oleh karena itu, dengan kesulitan menjangkau area kantor pos cabang pembantu yang jauh dan banyak. Beberapa kantor pos cabang pembantu yang menahan uang kas nya karena tidak dijemput dan itu menyebabkan kantor pos cabang pembantu yang mempunyai kas kantor yang melebihi batas maksimal kas (pagu kas).

Kelebihan pagu kas yang ada di setiap kantor pos cabang pembantu dapat dinilai kalau likuiditas PT. Pos Indonesia (Persero) tidak baik. Karena uang tunai yang tersebar di seluruh Indonesia akan menyebabkan sulitnya perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek yang harus dibayarkan sebelum jatuh tempo. Tetapi, jika memang diperlukan uang tunai yang melampaui pagu kas harus disertakan alasan yang jelas. Walaupun begitu harus mengajukan permohonan izin kepada Direktur Keuangan untuk memiliki kas yang melebihi batas. Jika tidak memberikan alasan yang jelas, uang kas yang berlebihan itu dapat menyebabkan idle money (dana yang menganggur). Pengertian idle money atau dana yang menganggur adalah uang yang tidak digunakan untuk apa pun dan tersimpan begitu saja tanpa tujuan yang jelas.

Seperti di Surat Edaran mengenai Pagu Kas, setiap tahun PT. Pos Indonesia (Persero) menetapkan pagu kas setiap kantor regional, kantor cabang utama dan kantor cabang. Tetapi saat ditelaah lebih dalam tidak ada ketentuan pagu kas yang dapat ditahan untuk kantor pos cabang pembantu. Walaupun kantor pos cabang pembantu terdapat di area yang terpencil tetapi seharusnya ada juga surat edaran untuk perihal pagu kas. Karena dengan mengetahui hal tersebut dapat memudahkan untuk mengetahui dan mengawasi bagaimana likuiditas di kantor tersebut. Jika, hanya kantor cabang yang mengetahui dan kantor cabang tidak memberikan informasi kepada kantor pusat akan sulit. Dengan menetapkan itu juga dapat memudahkan untuk melakukan penjemputan uang kas pada kantor tersebut. Agar semakin memudahkan mengawasi dapat di input informasi mengenai pagu kas kantor pos cabang pembantu di Sistem Powerbi. Jika terdapat berlebih kas di suatu kantor agar secepatnya ditanya apa alasannya dan melakukan penjemputan kas ke kantor tersebut. Tetapi, belum

tentu baik juga dan efektif melakukan penjemputan kas ke kantor pos cabang pembantu. Karena ada beberapa faktor yang membuat kalau penjemputan kas tidak efektif yaitu, keterbatasan kendaraan atau mobil pengangkutan uang dengan track (jalan tempuh) yang sangat sulit untuk dilalui oleh kendaraan. Itu juga bisa memungkinkan untuk terjadinya kejahatan untuk mencuri uang yang sedang dalam perjalanan. Lalu, melakukan penjemputan kas juga bisa menyebabkan beban kendaraan semakin besar karena jauhnya posisi masing-masing kantor pos cabang pembantu. Juga, tidak bisa dipastikan dalam satu hari bisa menyelesaikan penjemputan uang pasti mengakibatkan keterlambatan untuk diberikan ke kantor pusat.

Dari pemaparan diatas mengenai penjemputan kas pada kantor pos cabang pembantu, penulis merasa bahwa penjemputan kas sudah tidak efektif lagi. Untuk meminimalisir segala kemungkinan yang terjadi dalam proses penjemputan, lebih baik jika setiap kantor pos cabang pembantu mengirimkan uang kas perusahaan yang berlebih melalui bank atau transfer ke rekening kantor pusat. Tetapi tidak semua kawasan kantor pos cabang pembantu memiliki akses untuk mengirimkan uang via bank. Alternatif lainnya jika kantor pos cabang pembantu yang tidak memiliki akses dapat mengirimkan uang menggunakan kendaraan bermotor ke kantor pos cabang pembantu lainnya. Dan seluruh uang dari setiap kantor cabang pembantu dikumpulkan menjadi satu dan dikirimkan ke kantor cabang secara tepat waktu. Karena terdapat ketentuan untuk mengirimkan uang ke kantor, jika dalam satu hari tidak dikirimkan masih dapat dikirimkan keesokan hari nya sebelum pukul 12.00 WIB. Agar seluruh pengiriman uang kas dapat terealisasi dengan tepat waktu, seluruh kantor cabang pos indonesia dapat mengirimkan uang dengan berbagai alternatif. Jika ada kantor yang tidak melakukan sesuai yang ada di Surat Edaran, maka kepala kantor yang menanggungjawab perihal pengiriman uang diberikan sanksi ataupun surat peringatan. Agar likuiditas kantor cabang dapat dilakukan dengan ekonomis harus ada perhitungan untuk menentukan saldo pagu kas tiap kantor cabang pembantu. Agar menghindari terjadinya idle money pada kantor cabang pembantu. Sedangkan jika tidak dilakukan atau menunda pengiriman uang, maka saldo kas pada kantor cabang pembantu juga akan semakin besar dan memungkinkan untuk terjadinya fraud atau pencurian uang karena tidak dapat dikendalikan dengan baik likuiditas kantor.

Dengan adanya kasus permasalahan seperti yang telah penulis jelaskan tentang kasus pencurian uang kas. Pengambilan uang kas kantor untuk keperluan pribadi yang dilakukan oleh kepala kantor cabang pembantu. Dari permasalahan tersebut bisa kita ketahui jika kompetensi kepala kantor cabang pembantu yang tidak baik. Kecurangan yang terjadi dalam suatu entitas pada umumnya disebabkan oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengaruh lingkungan internal umumnya terkait antara lain dengan lemahnya pengendalian internal, lemahnya perilaku etika manajemen atau faktor likuiditas serta profitabilitas entitas yang bersangkutan. Upaya utama yang seharusnya dilakukan adalah pada pencegahannya. Karena itu upaya mencegah fraud, dimulai dari pengendalian internal.

Pengendalian internal sangat penting dalam setiap entitas, dengan adanya fraud berarti kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh internal perusahaan. Seharusnya kantor cabang yang menaungi kantor pos cabang pembantu harus selalu melakukan pengawasan dan pengendalian. Dimulai dari pengawasan arus kas ataupun transaksi-transaksi yang terjadi, begitu juga dengan pengendalian yang harus dilakukan karena jika sudah banyak uang kas yang berada di kantor tersebut harus dikirimkan ataupun dilakukan penjemputan. Jadi, sistem pengendalian internal secara potensial akan mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangan melalui pengawasan dan meningkatkan proses pelaporan keuangan dan organisasional yang sama baiknya menjamin pemenuhan yang bersangkutan dengan hukum dan regulasi. Efektivitas ketentuan hukum tidak dapat dicapai apabila tidak didukung norma dan nilai etika dari pihak terkait.

Bukan hanya didukung dengan pengendalian internal tetapi juga dengan etika seseorang tersebut. Sedangkan dalam konteks organisasi, nilai etika dan moral perorangan harus muncul sebagai aturan etika organisasi yang telah terkodifikasi sebagai kode etik dan kelengkapannya. Untuk itu setiap organisasi bertanggung jawab untuk berusaha mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Walaupun juga sudah terciptanya suatu standar untuk etika seorang pegawai, harus tetap diawasi juga oleh pihak kantor cabang. Ataupun jika memang sudah tidak tepat untuk dijadikan sebagai kepala kantor cabang pembantu seharusnya digantikan saja. Dengan ditetapkannya one man officer pada kantor pos cabang pembantu, mungkin agar beban tidak bertambah. Padahal dibandingkan kita menghemat untuk tidak mengeluarkan beban tetapi resiko kita sangat besar. Karena ternyata di setiap kantor pos cabang pembantu hanya ada 1 orang yang menjadi pengantar dan pengawas. Sedangkan setidaknya kita membutuhkan 2 orang agar pengantaran kas ke kantor cabang dapat dilakukan dengan baik.

Dengan adanya terkendalanya pengantaran uang kas berhubungan dengan faktor likuiditas yang memungkinkan untuk terjadinya pencurian uang, maka bisa kita lihat betapa pentingnya likuiditas. Karena semakin banyak likuiditas di suatu kantor akan semakin memungkinkan untuk terjadinya fraud.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari Karya Tulis ini, kesimpulan dari permasalahan pengendalian likuiditas dengan penjemputan kas pada Kantor Pos Cabang Pembantu yaitu:

1. Masih banyak kantor cabang pembantu yang menyimpan uang kas mereka yang melebihi saldo pagu. Hal ini bisa terjadi karena masih kurangnya kendaraan atau Armada Pos untuk menjemput kas.
2. Tidak bisa dilaksanakan dengan tepat waktu untuk penjemputan kas karena lokasi ataupun posisi kantor cabang pembantu yang berjauhan dengan kantor cabang ataupun kantor cabang utama.
3. Agar memudahkan untuk mengendalikan likuiditas, kantor pusat bagian treasury harus mengetahui saldo pagu tiap kantor pos cabang pembantu.

Berdasarkan pembahasan dari Karya Tulis ini, kesimpulan dari permasalahan untuk pencegahan fraud yaitu:

- Kurangnya pengawasan terhadap likuiditas kantor cabang pembantu dikarenakan one man officer.
- Pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.

Rekomendasi Pengendalian Likuiditas dengan Mengatur Penjemputan Kas pada Kantor Pos Cabang Pembantu

1. PT. Pos Indonesia (Persero) dmengajukan kerjasama dengan pihak perbankan khususnya dalam hal pick up service terhadap uang setoran di level KCP dengan maksimal penjemputan pukul 14.00 atau sebelum jam RTGS untuk selanjutnya dana tersebut dapat digunakan untuk membayar kewajiban terhadap mitra di Kantor Pusat.
2. Mengubah peraturan untuk batas pengiriman uang ke kantor cabang agar diberi spare time dengan mempertimbangkan beberapa hal. Agar lebih maksimal diberi peringatan kepada kantor cabang pembantu yang masih melewati batas hari pengiriman.
3. Melakukan pengawasan yang tersistem ke Sistem Powerbi agar dapat diketahui sebelum masyarakat luar dan harus manager UPL yang lebih dulu mengetahui jika

ada masalah dan dapat dicegah sebelum terjadinya fraud.

Pencegahan Fraud

1. Melakukan penambahan pegawai kepada kantor cabang pembantu yang sering mengalami kelebihan pagu kas kantor.
2. disamping pengendalian internal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan fraud, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya fraud (fraud awareness) dan upaya menilai risiko terjadinya fraud (fraud risk assessment).

DAFTAR PUSTAKA

<https://mediaindonesia.com/nusantara/510073/polisi-bongkar-kasus-korupsi-di-kantor-pos-cabang-pembantu-di-purbalingga>

<https://accurate.id/akuntansi/risiko-likuiditas/>

<https://www.blj.co.id/2009/12/01/mengatasi-risiko-likuiditas/> AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 2, Nov 2016